

Strategi Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Wahyu Riyanto¹, Fauzan Prima Yodha²

¹Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,

²Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima, Jan 9, 2024
Revisi, Feb 02, 2024
Disetujui, Feb 20, 2024

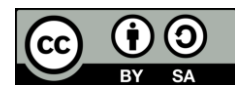
Katakunci:

ATCS,
E-Purchasing,
Marka Jalan,
Tender,
ZOSS.

ABSTRAK

Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Satu diantara fungsi seksi ini adalah penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota dimana dalam upaya memenuhi fungsi tersebut terdapat satu tahap yang tidak bisa dihindari yaitu tahap pengadaan barang/jasa. Merujuk pada data yang bersumber dari LPSE Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang telah selesai yaitu : 1) Pengadaan dan Pemasangan ATCS; 2) Pemeliharaan marka jalan; dan 3) Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS. Ketiga paket pekerjaan ini merupakan paket pengadaan yang rutin dianggarkan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Proses pemilihan ketiga paket tersebut melalui tender yang pada pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang terjadi berulang-ulang seperti proses reuiu persiapan yang lebih dari 1 (satu) kali, maupun tender gagal dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga dilakukan tender ulang yang berakibat mundurnya pelaksanaan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengadaan yang dapat mendorong proses pengadaan yang efektif dan efisien secara waktu sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat terselesaikan sesuai target yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh strategi pengadaan yang dapat menjadi bahan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku PA dengan merubah metode pemilihan Penyedia dari tender menjadi *e-purchasing* melalui *e-katalog* lokal Pemerintah Kota Yogyakarta.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis:

Wahyu Riyanto,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,
Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta.
Email: wahyu.riyanto@jogjakota.go.id

1. PENDAHULUAN

Dinas perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan. Merujuk pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, dan Bidang Perparkiran. Pada Bidang Lalu Lintas terdiri atas : 1) Kelompok Substansi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; 2)

Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; 3) Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021).

Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Satu diantara fungsi seksi ini adalah penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota, dimana dalam upaya memenuhi fungsi tersebut terdapat satu tahap yang rutin dilaksanakan yaitu tahap pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa dapat diartikan sebagai salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak (Mulyono, 2017). Merujuk pada laman LPSE Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan konstruksi yang telah selesai yaitu : 1) Pengadaan dan Pemasangan ATCS; 2) Pemeliharaan marka jalan; dan 3) Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS. Ketiga paket pekerjaan ini merupakan paket pengadaan yang rutin dianggarkan pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana data pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Histori Pengadaan pada Seksi Sarana Prasarana 3 (tiga) tahun terakhir

Nama Paket	Tahun			Metode Pemilihan	Rata-rata Pelaksanaan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	Keterangan
	2021	2022	2023			
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS)	√	√	√	Tender	Lebih dari 1 (satu) kali	Tender ulang pada tahun 2022, 2023
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan)	√	√	√	Tender	Lebih dari 1 (satu) kali	Tender ulang pada tahun 2021
Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS	√	√	√	Tender	Lebih dari 1 (satu) kali	Tender ulang pada tahun 2021

Sumber : <http://lpse.jogjakota.go.id/eproc4/lelang> (LKPP, 2024b)

Selanjutnya merujuk pada DPA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 paket pekerjaan tersebut kembali dianggarkan dengan rincian sesuai pada Tabel 2. berikut :

Tabel 2. Data Pengadaan pada Seksi Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2024

Nama Paket	Metode Pemilihan	Pagu Anggaran (Rp)
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS)	Tender	Rp. 220.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan)	Tender	Rp. 740.000.000,00
Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS	Tender	Rp 600.000.000,00

Sumber : DPA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2024 (Dinas Perhubungan, 2024)

Merujuk data pada Tabel 1. diatas proses pemilihan ketiga paket tersebut melalui tender dimana berdasarkan histori tahapan pemilihan Penyedia terdapat beberapa kendala yang terjadi berulang-ulang diantaranya adalah : 1) proses reuiu dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali; 2) tender gagal dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga dilakukan tender ulang yang berakibat mundurnya pelaksanaan kontrak. Selain itu merujuk pada Tabel 2. ketiga paket pekerjaan tersebut kembali dianggarkan untuk tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 2. dengan metode pemilihan yaitu tender.

Disisi lain berdasarkan keputusan Kepala LKPP No 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik disebutkan bahwa keberadaan katalog elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/*platform* dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2022). Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat. Hal ini didukung oleh penelitian Lestyowati, J. (2018) bahwa Katalog elektronik menampilkan barang dan jasa yang dibutuhkan satuan kerja dengan spesifikasi dan harga yang bersaing. *E-purchasing* diselenggarakan dengan tujuan : 1) Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (Katalog elektronik) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; 2) Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (Lestyowati, 2018). Selanjutnya pada penelitian Iqbal, M. (2020) menyebutkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e-katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Iqbal, 2020).

Sehingga berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini akan dibahas secara detail kemungkinan permasalahan yang terjadi selama ketiga paket di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tersebut apabila dilaksanakan kembali melalui metode Tender pada tahun anggaran 2024. Analisis data dilakukan dengan merujuk hasil pengadaan pada tahun anggaran 2021, 2022, maupun 2023 dan selanjutnya akan dianalisis dengan strategi pendekatan metode pengadaan lain yaitu melalui *E-Purchasing* yang diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah yang selama ini timbul dan mendorong proses pengadaan yang efektif dan efisien sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat terselesaikan sesuai target yang ditetapkan oleh PA/KPA bahkan dapat terselesaikan lebih cepat, dan diharapkan katalog elektronik mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi kredibel dan akuntabel (Lestyowati, 2018). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mendorong peningkatan prosentase belanja katalog elektronik (*e-purchasing*) pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 mengingat realisasi belanja Dinas Perhubungan menggunakan e-katalog pada tahun 2023 hanya sebesar 0,64 % atau sebesar Rp 817.278.761,00 dari total capaian keseluruhan transaksi e-katalog seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 127.008.090.996,00 pada tahun anggaran 2023 (LKPP, 2024a).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Secara ringkas penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk tercapainya suatu hasil yang baik dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode (Soeryono Soekamto, 2006). Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lexy, J. M. (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan (Lexy J. Moleong, 2007).

a) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa dokumen persiapan pengadaan yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, maupun arsip hasil pengadaan ketiga paket tersebut yang diperoleh dari Pengolah Data dan Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa dan Tim Pokja Pemilihan. Data-data lain yang dibutuhkan berupa data sekunder yaitu data yang bersumber dari Pengolah Data dan Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa diantaranya adalah rekapitulasi paket pengadaan yang masuk di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta tahun anggaran 2021, 2022, 2023 dan histori proses maupun hasil pengadaan yang dapat diakses melalui laman <http://lpse.jogjakota.go.id/>, selain itu artikel ilmiah berupa jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian, dan regulasi yang berkaitan dengan metode pengadaan tender maupun *e-purchasing*.

b) Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dimulai pada Bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024.

c) Teknik Analisa Data

Teknik Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bermakna analisis dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik melalui studi lapangan maupun studi pustaka. Pada saat melakukan analisis, Peneliti tidak mendasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang selanjutnya dianalisis untuk dapat memunculkan gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian (Lestyowati, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilaksanakan oleh Peneliti di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan fokus pada tahapan pengadaan sampai diperoleh pemenang pada paket : 1) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS); 2) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan); 3) Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS dengan fokus pada kendala - kendala yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam memproses ketiga paket tersebut yang selanjutnya dilakukan pemetaan masalah, kemungkinan resiko yang akan terjadi, maupun rekomendasi alternatif untuk tahun anggaran 2024. Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

3.1. Analisa Hasil Pengadaan 3 (tiga) Tahun Terakhir

Ditinjau dari tahap reviu persiapan dokumen pengadaan pada tabel 1. dapat dilihat bahwa reviu persiapan dokumen pengadaan dilakukan rata-rata lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) Secara garis besar kesalahan pada RUP dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengadaan, penganggaran, dan kondisi lain yang terjadi di Instansi pada saat tahun anggaran berlangsung sehingga terjadi pergeseran tatakala yang sebelumnya sudah ter-inputkan di awal tahun anggaran; 2) Pada dokumen spesifikasi teknis belum menggambarkan secara detail barang/jasa yang dibutuhkan, sedangkan untuk gambar/DED umumnya masih mencantumkan identitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan atau gambar/DED belum terlampirkan; 3) Pada HPS umumnya upah belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, selain itu untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dinaungi OPD Non Teknis AHS belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan 4) Rancangan kontrak belum sesuai dengan MDP pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021. Pelaksanaan reviu persiapan dokumen pengadaan yang berulang sangat berpengaruh terhadap tahap selanjutnya yaitu proses pemilihan Penyedia dan pelaksanaan kontrak (Riyanto, 2022).

Ditinjau dari hasil pengadaan dapat diketahui rata-rata ketiga paket tersebut terjadi tender gagal dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga perlu pengulangan proses tender (tender ulang). Secara detail hasil pengadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Data Hasil Pengadaan pada Seksi Sarana Prasarana 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Nama Paket	Tahun	Uraian	
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS)	2021	Pelaksanaan tender : 1 (satu) kali - Jumlah penawaran masuk 3 (tiga) Peserta - Lulus evaluasi teknis 2 (dua) Peserta	
	2022	Pelaksanaan tender : 2 (dua) kali a. Tender ke-1 - Jumlah penawaran masuk 3 (tiga) Peserta - Tidak ada Peserta yang Lulus evaluasi teknis	
		b. Tender ke-2 (ulang) - Jumlah penawaran masuk 3 (tiga) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (dua) Peserta	
	2023	Pelaksanaan tender : 2 (dua) kali a. Tender ke-1 - Jumlah penawaran masuk 1 (satu) Peserta - Tidak ada Peserta yang Lulus evaluasi teknis	
		b. Tender ke-2 (ulang) - Jumlah penawaran masuk 4 (empat) Peserta - Lulus evaluasi teknis 3 (tiga) Peserta	
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan)	2021	Pelaksanaan tender : 2 (dua) kali a. Tender ke-1 - Jumlah penawaran masuk 5 (lima) Peserta - Tidak ada Peserta yang Lulus evaluasi teknis
			b. Tender ke-2 (ulang) - Jumlah penawaran masuk 5 (lima) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (satu) Peserta
		2022	Pelaksanaan tender : 1 (satu) kali - Jumlah penawaran masuk 3 (tiga) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (satu) Peserta
		2023	Pelaksanaan tender : 1 (satu) kali - Jumlah penawaran masuk 5 (lima) Peserta - Lulus evaluasi teknis 2 (dua) Peserta
Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS		2021	Pelaksanaan tender : 2 (dua) kali a. Tender ke-1 - Jumlah penawaran masuk 1 (satu) Peserta - Tidak ada Peserta yang Lulus evaluasi teknis
	b. Tender ke-2 (ulang) - Jumlah penawaran masuk 1 (satu) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (satu) Peserta		
	2022	Pelaksanaan tender : 1 (satu) kali - Jumlah penawaran masuk 1 (satu) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (satu) Peserta	
	2023	Pelaksanaan tender : 1 (satu) kali - Jumlah penawaran masuk 1 (satu) Peserta - Lulus evaluasi teknis 1 (satu) Peserta	

Sumber : <http://lpse.jogjakota.go.id/eproc4/lelang> (LKPP, 2024b).

Selanjutnya penawaran peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk paket pekerjaan 1) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS); dan 2) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan) dibawah 90 % dari nilai HPS PPK, bahkan pada tahun 2023 kedua paket tersebut penawaran

hanya sebesar 82,04 % dan 81,56 % dari nilai HPS PPK. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sangat beresiko penawaran dibawah 80 % sehingga perlu evaluasi kewajaran harga (EKH), selain itu pada pelaksanaan konstruksi penawaran yang terlalu jauh dengan HPS PPK cenderung beresiko terhadap ketidaksesuaian kualitas pekerjaan, maupun ketidaksesuaian/*downgrade* spesifikasi teknis bahan/material yang telah ditetapkan PPK. Sedangkan sesuai data pada tabel 4. dibawah ini dapat diketahui hanya paket Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS yang memiliki penawaran lebih dari 90 % :

Tabel 4. Data Hasil Pengadaan pada Seksi Sarana Prasarana 3 (Tiga) Tahun Terakhir Berdasarkan Prosentase Penawaran Terhadap Nilai HPS PPK (%)

Nama Paket	TA	Total Nilai		Prosentase Penawaran Terhadap Nilai HPS PPK (%)
		HPS PPK (Rp)	Penawaran Pemenang (Rp)	
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS)	2021	258.511.121,00	219.734.485,36	85,00
	2022	201.090.723,00	176.935.552,06	87,99
	2023	218.284.025,00	179.090.025,26	82,04
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pemeliharaan Marka Jalan)	2021	699.970.704,00	664.205.867,05	94,89
	2022	404.313.215,00	334.959.606,47	82,85
	2023	515.866.793,00	420.758.335,98	81,56
Belanja Modal Rambu Bersuar Pengadaan dan Pemasangan ATCS	2021	664.677.957,00	645.874.641,63	97,17
	2022	599.914.091,00	550.883.347,70	91,83
	2023	549.929.013,00	539.099.406,75	98,03

Sumber : <http://lpse.jogjakota.go.id/eproc4/lelang> (LKPP, 2024b).

3.2. Alternatif Pengadaan pada Tahun Anggaran 2024

Pada poin pembahasan mengenai analisa hasil pengadaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk tiga paket tersebut diatas perlu dilakukan strategi atau alternatif melalui pendekatan metode pemilihan lain yang dirasa lebih efektif untuk meminimalisir segala kemungkinan resiko pada tahap pengadaan yang sifatnya berulang. Berdasarkan karakteristik paket metode pengadaan yang dapat direkomendasikan adalah melalui *e-purchasing* dengan e-katalog lokal Pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut pada tabel 5. dapat dilihat perbedaan pelaksanaan tender dan *e-purchasing* (e-katalog) ditinjau dari berbagai aspek :

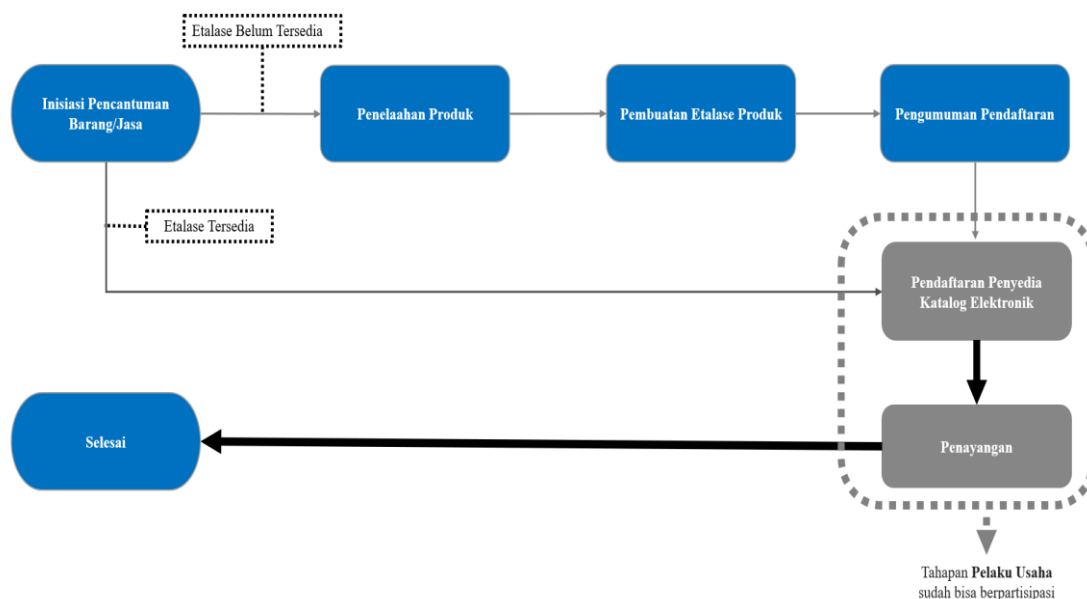
Tabel 5. Perbedaan Pelaksanaan Tender dan E-Purchasing (E-Katalog) ditinjau dari Berbagai Aspek

No	Aspek yang ditinjau	Metode Pengadaan	
		Tender	E-Purchasing (Katalog Elektronik)
1	Dokumen persiapan pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - HPS - Spesifikasi teknis - Spesifikasi teknis & gambar - Rancangan kontrak - Kelengkapan kebutuhan reuiu persiapan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi teknis - Prioritas penggunaan PDN - Prioritas Penyedia usaha kecil - Pengumpulan referensi harga
2	Pelaku pengadaan	Pokja pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan (PP) atau PPK pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing
3	Tahap reuiu persiapan & pemilihan	Memerlukan proses reuiu persiapan dan reuiu pemilihan yang membutuhkan waktu cukup	PP atau PPK dapat melakukan reuiu dokumen persiapan pengadaan <i>e-purchasing</i> sebelum melakukan

			lama apabila dokumen persiapan pengadaan belum lengkap/terdapat revisi. Umumnya 1 – 2 minggu sampai dengan paket tayang	transaksi dan dapat melakukan transaksi secara langsung/saat itu juga apabila dokumen tersebut sudah sesuai
4	Tahapan pemilihan Penyedia barang/jasa		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman pascakualifikasi - Download dokumen pemilihan - Pemberian penjelasan - Upload dokumen penawaran - Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga - Pembuktian kualifikasi - Penetapan pemenang - Pengumuman pemenang - Masa sanggah - Surat penunjukan Penyedia barang/jasa - Penandatanganan kontrak. 	<p>Melalui negosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat paket <i>e-purchasing</i> - Negosiasi harga - Negosiasi layanan teknis pendukung (apabila diperlukan) - Penandatanganan surat pesanan (kontrak) - Update Keseluruhan Progres pada Aplikasi Katalog Elektronik <p>Melalui mini kompetisi Produk/Spesifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat paket <i>e-purchasing</i> - <i>Membuat kompetisi</i> - Masa pemasukan penawaran Update status kompetisi - Publikasi kompetisi - <i>Generate</i> paket <i>e-Purchasing</i> selesai - Penandatanganan surat pesanan (kontrak) <p>Melalui competitive catalogue</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia pada aplikasi e-katalog
5	Estimasi waktu pemilihan sampai dengan berkontrak	Penyedia dengan	30 – 45 Hari	3 – 14 Hari
6	Harga peserta	penawaran	Harga penawaran kecenderungan terpaut jauh dengan HPS PPK dan resiko terjadi evaluasi kewajaran harga (EKH)	Tidak ada evaluasi kewajaran harga (EKH)
7	Sanggah banding		Terdapat sanggah banding	Tidak ada sanggah banding
8	Proses kontrak		PPK dapat melakukan kontrak setelah tahap pelimpahan hasil pemilihan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Umumnya membutuhkan waktu 1 – 3 hari karena pelimpahan melalui <i>e-office</i> Pemerintah Kota Yogyakarta	PPK dapat langsung melakukan kontrak setelah proses transaksi selesai dilaksanakan oleh PP atau PPK

Sumber : Hasil wawancara dengan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan (*Sampling*).

Merujuk pada hasil analisa Tabel 5. maka pelaksanaan pemilihan Penyedia pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta direkomendasikan menggunakan *e-Purchasing* melalui *e-katalog* lokal Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 1. Alur Proses Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik

Selanjutnya sesuai pada Gambar 1. tahapan yang harus dipersiapkan oleh Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk memperlancar persiapan pengadaan pada tahun anggaran 2024 melalui *e*-katalog adalah memperbarui pengumuman pendaftaran Penyedia katalog elektronik. Hal ini dikarenakan etalase fasilitas perlengkapan jalan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah tersedia dengan rincian kategori : 1) Marka jalan; 2) Rambu-rambu bersuar; dan 3) Rambu-rambu lalu lintas. Berikut secara rinci *update* produk per 31 Januari 2024 untuk etalase fasilitas perlengkapan jalan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sesuai pada Tabel 6. :

Tabel 6. Etalase Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

No	Kategori	Sub Kategori	Jumlah Penyedia	Jumlah Produk Tayang
1	Marka Jalan	<i>Glassbead</i>	0	0
		Pengadaan marka jalan hijau	0	0
		Pengadaan marka jalan kuning	0	0
		Pengadaan marka jalan merah	0	0
		Pengadaan marka jalan putih	0	0
2	Rambu-Rambu Bersuar	APILL Tipe Simpang 3	1	3
		APILL Tipe Simpang 3 ATCS	0	0
		APILL Tipe Simpang 4	1	3
		APILL Tipe Simpang 4 ATCS	0	0
		<i>Pelican Crossing</i>	1	1
3	Rambu-Rambu Lalu Lintas	<i>Warning Light</i>	0	0
		<i>Delineator</i>	0	0
		Paku Marka Jalan	0	0
		Paku Marka Jalan Elektronik	0	0
		Papan Nama Jalan	0	0
		Rambu Larangan	0	0
		Rambu Peringatan	1	1
		Rambu Perintah	0	0
		Rambu Petunjuk	0	0
Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	0	0		

Sumber : *E*-Katalog Pemerintah Kota Yogyakarta (LKPP, 2024a).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terkait “Strategi Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta” dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan konstruksi yang rutin dianggarkan setiap tahun yaitu : 1) Pengadaan dan Pemasangan ATCS; 2) Pemeliharaan marka jalan; dan 3) Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS. Merujuk pada hasil pengadaan tahun 2021, 2022, maupun 2023 ditinjau dari tahap revidi persiapan dokumen pengadaan dilakukan rata-rata lebih dari satu kali yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) terdapat kesalahan input pada RUP; 2) Pada dokumen spesifikasi teknis dan gambar/DED belum menggambarkan secara detail barang/jasa yang dibutuhkan; 3) Penyusunan HPS umumnya belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan 4) Rancangan kontrak belum sesuai dengan MDP pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021. Setelah dilakukan pencermatan dari kasus diatas telah dilakukan strategi atau alternatif pengadaan melalui pendekatan metode pemilihan lain yang dirasa lebih efektif untuk meminimalisir segala kemungkinan resiko pada tahap pengadaan yang sifatnya berulang yaitu dengan melalui *e-purchasing* dengan e-katalog lokal Pemerintah Kota Yogyakarta. Tahapan yang harus dipersiapkan oleh Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk memperlancar persiapan pengadaan pada tahun anggaran 2024 melalui *e-katalog* adalah memperbarui pengumuman pendaftaran Penyedia katalog elektronik, hal ini dikarenakan etalase fasilitas perlengkapan jalan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah tersedia dengan rincian kategori : 1) Marka jalan; 2) Rambu-rambu bersuar; dan 3) Rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif terhadap masalah yang selama ini timbul dan mendorong proses pengadaan yang efektif dan efisien, selain itu untuk mendorong peningkatan prosentase belanja katalog elektronik (*e-purchasing*) pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada Tahun 2024.

REFERENSI

- Dinas Perhubungan. (2024). Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam *Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3, 77–97.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 669–695.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- LKPP. (2022). Keputusan Kepala LKPP No 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Dalam *LKPP*.
- LKPP. (2024a). *E-katalog LKPP (Pemerintah Kota Yogyakarta)*. LKPP. <https://e-katalog.lkpp.go.id/>
- LKPP. (2024b, Februari 16). *LPSE Kota Yogyakarta*. <http://lpse.jogjakota.go.id/eproc4/>
- Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32–42. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan*. https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/3093
- Riyanto, W. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Kasus : Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2022). *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*, 1(2), 86–96. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/21>
- Soeryono Soekamto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.